

Peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan: sistematik reviu

Titik Yuliana ^{1*}, Siti Maysaroh ²

^{1,2}. Universitas PGRI Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

*Corresponding author: bravo.yuliana@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 24, 2025

Revised August 4, 2025

Accepted September 21, 2025

Available online September 21, 2025

Kata Kunci:

peran pemerintah; peran masyarakat; pendidikan.

Keywords:

role of government; role of society; education.



This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) international license.

Copyright © 2025 by Author. Published by
Balai Tekkomdik DIY, Dinas Dikpora
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji isu yang berkaitan dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam konteks pendidikan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat berkontribusi dalam memajukan sistem pendidikan, mencapai tujuan pendidikan yang efektif, dan meningkatkan kualitas Pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan sisdiknas. 2) Mengidentifikasi upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan, dan kualitas pendidikan. 3) Meneliti peran masyarakat dalam mendukung dan memperkuat sisdiknas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Penulis melakukan pencarian literatur yang relevan melalui sumber-sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi pemerintah. Data yang ditemukan kemudian dianalisis secara sistematis dan dikategorikan berdasarkan tema dan konsep yang terkait dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, memfasilitasi aksesibilitas, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Sementara itu, masyarakat memiliki peran aktif dalam mendukung

pendidikan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan, dukungan finansial, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Berdasarkan tinjauan Pustaka dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Diperlukan kerjasama erat antara kedua pihak untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi strategi dan kebijakan yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan Pendidikan.

ABSTRACT

This article examines issues related to the role of government and society in the context of education. The main focus of this research is to analyze how the government and society can contribute to advancing the education system, achieving effective educational goals, and improving the quality of education. The aims of this research are 1). Analyzing the government's role in the development and development of the national education system. 2) Identify the government's efforts to improve accessibility, equity, and quality of education. 3) Researching the role of the community in supporting and strengthening the national education system. The method used in this study is a literature review. The author conducted a search for relevant literature through academic sources such as scientific journals, books, research reports and government publications. The data found were then analyzed systematically and categorized based on themes and concepts related to the role of government and society in education. The results of this study indicate that the government has a responsibility to provide quality education, facilitate accessibility, develop relevant curricula, and improve teaching quality. Meanwhile, the community has an active role in supporting education through participation in educational decision making, financial support, and involvement in school activities. Based on the literature review in this study, it can be concluded that collaboration between government and society is very important. Close cooperation is required between the two parties to address various educational challenges. Future research can explore effective strategies and policies to involve the community in educational decision making.

1. Pendahuluan

Pendidikan dalam suatu negara merupakan pilar utama. Dengan pendidikan, individu mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global serta mencapai kebahagiaan personal dan kemajuan sosial. Dalam situasi ini, peran masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan sangatlah signifikan karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil dan mutu pendidikan yang baik.

Meskipun pemerintah telah banyak melakukan upaya signifikan dalam meningkatkan sistem pendidikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan akses pendidikan, kualitas pengajaran yang rendah, kurangnya sumber daya yang memadai, dan ketidaksetaraan pendidikan antar wilayah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan dan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada.

Terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan. Meskipun telah banyak penelitian yang menyoroti pentingnya peran pemerintah dan masyarakat, masih diperlukan kajian literatur yang komprehensif dan terkini untuk menggali lebih dalam mengenai strategi, kebijakan, dan program yang efektif dalam memajukan sistem pendidikan. Selain itu, menghubungkan hasil penelitian dengan justifikasi urgensi penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan akan mengarahkan upaya kebijakan yang lebih efektif.

Selama ini, masyarakat seolah hanya dipandang sebagai unsur pelengkap dalam pendidikan. Peran sertanya tidak begitu banyak membawa pengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam pendidikan. Yang terjadi Pemerintah terkesan mendikte apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Semestinya tidak seperti ini kondisi yang baik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Inilah hal baru yang masih jarang disorot oleh para peneliti.

Terdapat berbagai pandangan tentang pendidikan dari para ahli terdahulu yang membahas peran pemerintah dan masyarakat dalam Pendidikan di antaranya: 1) Teori Keadilan Pendidikan (Education Equity Theory): Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesetaraan akses dan kesempatan, sehingga pendidikan dapat dijangkau oleh semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun etnis mereka. Pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada (Amadi, 2012). 2) Teori Pendidikan sebagai Investasi (Education as Investment Theory): Teori ini menyatakan bahwa pendidikan memiliki nilai investasi jangka panjang yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab untuk menginvestasikan sumber daya dalam pendidikan guna menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Hasan *et al.*, 2021). 3) Penelitian tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan: Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi keluarga dalam pendidikan anak memiliki dampak positif pada motivasi, prestasi akademik, dan kesejahteraan siswa. Keterlibatan masyarakat juga dapat berupa dukungan dalam bentuk sukarela, kolaborasi dengan sekolah, atau kegiatan pengembangan masyarakat (Hidayatulloh & Fauziyah, 2020). 4) Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan: Ada banyak penelitian yang mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan dampaknya terhadap hasil belajar dan kesetaraan pendidikan. Penelitian ini melibatkan analisis kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, program beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan evaluasi kurikulum. Hasil penelitian semacam ini memberikan wawasan bagi pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang efektif (Setiadi, 2016).

Dalam kegiatan ini, peneliti memiliki tujuan untuk 1). Meneliti peran masyarakat dalam mendukung dan memperkuat sisdiknas. 2). Menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan sisdiknas. 3). Mengidentifikasi upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan, dan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan memiliki manfaat penting dalam meningkatkan

kebijakan pendidikan, memperbaiki praktik, mengevaluasi program, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan.

2. Metode Penelitian

Studi tentang peran pemerintah dan masyarakat ini berjenis kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Metode ini melibatkan analisis dan sintesis literatur dan sumber daya yang relevan, seperti kebijakan pendidikan, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen resmi. Studi literatur dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan serta perkembangan terkini dalam bidang tersebut.

Peneliti menggunakan PRISMA, yaitu suatu item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematis dan meta-analisis, yang merupakan petunjuk cara melaporkan tinjauan pustaka atau penelitian sistematis. PRISMA membantu peneliti mengidentifikasi dan melaporkan langkah-langkah yang relevan dalam melakukan tinjauan pustaka dengan metode yang sistematis. Selain itu, peneliti juga menggunakan aplikasi pencarian menggunakan database Google Scholar untuk menemukan makalah yang diterbitkan antara 2005 dan 2022, kemudian ditetapkan 16 naskah. Setelah itu, peneliti kemudian melakukan analisis dan sintesis terhadap naskah-naskah yang terseleksi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam Pendidikan serta mengetahui perkembangan terkini dalam bidang tersebut. Dengan metode tinjauan Pustaka yang mendalam ini peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam Pendidikan tanpa harus terjun langsung ke lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Fungsi Penelitian

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting yang harus diemban dan dilaksanakan. Astawa, I. N. T. (2017). Fungsi pendidikan keluarga antara lain menanamkan nilai agama, budaya, moral, serta ketrampilan. Syarbini, A. (2014). Pembelajaran di instansi pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan berbagai sikap, nilai, pengetahuan, dan ketrampilan Haderani, H. (2018). Pendidikan luar sekolah memiliki fungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan warga masyarakat, agar mereka memiliki bekal dan mampu untuk berperan serta secara aktif, efektif, dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Saleh, S., Nasution, T., & Harahap, P. (2020).

Dhomiri, A., Junedi, J., & Nursikin, M. (2023) mengatakan bahwa sistem pendidikan di dalam suatu negara berfungsi sebagai berikut: 1) Untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap jati diri sebagai bagian dari suatu bangsa melalui sejarah dan kejadian-kejadian penting lainnya. 2) Untuk mengembangkan Bahasa percakapan yang belum pernah ada sebelumnya. 3) Sebagai empat untuk menanamkan pemahaman tentang social politik. 4) Sebagai ajang untuk membangun kekecakapan khusus, sebagai bekal untuk meraih ekonomi yang mumpuni dan memadai.

Pendidikan nasional mempunyai peran dan tujuan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pada bab kedua pasal yang ketiga. Menurut pasal tersebut, secara ringkas tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, menciptakan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Di samping hal-hal yang telah disebutkan, pendidikan di Indonesia menurut Undang-undang yang ada juga bertujuan untuk mengembangkan potensi para peserta didik agar mereka menjadi insan yang memiliki iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, memiliki Kesehatan yang baik, pengetahuan yang luas, kemampuan yang memiliki akhlak yang mulia, kesehatan yang baik, pengetahuan yang luas, kemampuan yang mumpuni, kreatif, mandiri, sekaligus menjadi warga negara yang berprinsip demokratis dan penuh tanggung jawab.

Tujuan Pendidikan

Pendidikan dimulai dengan menerima individu apa adanya sesuai dengan kondisi aktualnya, seraya mempertimbangkan berbagai kompetensi yang dimiliki. Tujuan utama pendidikan dimulai dengan menerima individu sesuai kondisi aktualnya, sambil mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengarahkan perkembangan individu mencapai tingkatan yang terbaik yang sesuai dengan cita-cita atau idealitas manusia yang diharapkan. Tujuan utamanya adalah mengarahkan perkembangan individu menuju menjadi versi terbaik yang sesuai dengan cita-cita atau idealitas manusia yang diharapkan. Sujana, I. W. C. (2019). Dengan kata lain pendidikan bertujuan untuk pencapaian derajat manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhannya, bermoral baik, sehat, cerdas, memiliki empati dan kemauan yang kuat, serta mampu menghasilkan karya. Pendidikan juga bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan secara wajar, mengendalikan hawa nafsu, berkepribadian yang baik, pandai berinteraksi dalam masyarakat, dan memiliki pemahaman budaya. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa pendidikan hendaknya bisa memanusiakan manusia. Pada tahun 2015, UNESCO telah menetapkan 6 tujuan Pendidikan yang telah disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara di dunia.

Tujuan tersebut adalah: 1) Memperbanyak dan mengoptimalkan perawatan kesehatan dan pengajaran bagi anak usia dini secara holistik terutama untuk anak-anak yang paling banyak memiliki resiko kurang beruntung. 2) Penjaminan bagi semua anak perempuan serta anak-anak yang berada dalam kondisi yang sulit, serta anak-anak dari etnis minoritas pada tahun 2015 memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dasar yang lengkap dan harus berkualitas baik. 3) Menjamin kebutuhan belajar pendidikan bagi para remaja dan dewasa agar tercukupi lewat akses yang adil terkait dengan proses belajar yang tepat dan program kecakapan hidup. 4) Mencapai hingga tingkat separuh peningkatan kemampuan baca tulis bagi orang dewasa memasuki tahun 2015 utamanya bagi perempuan serta kemudahan pendidikan tingkat dasar dan berkelanjutan bagi para orang dewasa secara adil. 5) Mengatasi disparitas gender dalam konteks pendidikan di tingkat dasar dan menengah di tahun 2015 dan mencapai persamaan gender dalam kesempatan yang sama dan merata untuk mencapai prestasi pada pendidikan dasar dengan mutu yang memadai. 6) Memperluas keterjangkauan pendidikan dan memastikan kecemerlangan bagi setiap orang sehingga mencapai hasil pembelajaran yang diakui dan dapat dicapai oleh siapa saja, baik dalam literasi, numerasi, dan kecakapan hidup yang vital.

Menurut Havelock & Huberman tujuan dari suatu sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, adalah untuk menghasilkan output yang mahir yang bisa mengisi aneka tugas ataupun tanggung jawab dalam bursa kerja. Selain itu melalui pengajaran, pendidikan juga bertujuan untuk menyediakan generasi baru dalam masyarakat, dimana hasil dari pendidikan yang telah ditempuh bisa digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara secara menyeluruh. Kurniati, P., Kelmaskouw, A.L., Deing, A., Boni, B., & Haryanto, B.A. (2002).

Suatu sistem pendidikan yang baik harus memiliki 3 fokus utama, antara lain: Noor, T. (2018). 1) Memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk dengan leluasa dan secara mudah memperoleh sumber belajar kapan pun saat diperlukan. 2) Membuka peluang bagi setiap manusia yang hendak berbagi ilmunya kepada yang lain dengan cara yang mudah, dan sebaliknya, bagi orang yang ingin mengaksesnya. 3) Memastikan ketersediaan informasi umum tentang pendidikan. Ivan menegaskan pentingnya keleluasaan bagi individu dalam menjangkau pendidikan untuk mencapai tujuan hidup yang mereka inginkan.

Tujuan utama dari sistem pendidikan di Indonesia ialah mencapai mutu setiap orang di Indonesia sebagai manusia yang berkualitas yaitu sebagai ciptaan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, memiliki akhlak yang baik, memiliki kepribadian, mampu berdiri sendiri, kuat, pandai, kreatif, mahir, disiplin, memiliki semangat kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat baik jasmani maupun ruhani. Pendidikan juga wajib mengembangkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme yang tinggi.

Peran masyarakat dalam memajukan mutu pendidikan

Masyarakat bisa menunjukkan peran sertanya terhadap pendidikan di sekolah melalui forum dewan sekolah (komite sekolah). Dalam pendidikan, masyarakat bisa berperan melalui berbagai hal seperti berikut: 1) Partisipasi melalui konsultasi. Pada tahap ini orangtua datang ke sekolah untuk mengutarakan berbagai hal mengenai kendala belajar yang dialami oleh anak-anak mereka. 2) Turut andil dalam melakukan pelayanan misalnya kegiatan lawatan studi, sebagai panitia kegiatan keagamaan, menjadi mitra dagang usaha yang dilakukan sekolah, dan lain sebagainya. 3) Ambil bagian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Contohnya, ketika sekolah mengadakan kegiatan sosialisasi kesehatan, masyarakat bisa menjadi narasumber tentang gizi. Masyarakat juga bisa menjadi bagian dari organisasi yang melakukan pengawasan terhadap terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Sekolah mengajak orangtua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan, isu-isu gender, gizi, dan sebagainya. Contoh keterlibatan yang lain yaitu menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. 4) Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Orang tua dan masyarakat terlibat secara aktif dalam berdiskusi mengenai isu-isu pendidikan baik yang berhubungan dengan aspek akademis maupun non-akademis. Mereka juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang Rencana Pembangunan Sekolah.

Ketika suatu program pendidikan tidak melibatkan masyarakat di dalamnya maka program-program pendidikan disebut tidak memberdayakan masyarakat, namun jika masyarakat dijadikan subyek dalam program pendidikan maka keikutsertaan ini merupakan penguatan bagi masyarakat dalam perannya di bidang pendidikan (Hermanto, S., Uda, T., & Alexandro, 2014).

Penguatan masyarakat secara institusional dapat memperkuat dan memperkokoh posisi dan keterlibatan masyarakat dalam konteks pendidikan. Hal ini melibatkan pengorganisasian anggota masyarakat sebagai warga negara yang mandiri, yang memiliki kebebasan dan kesetaraan untuk terlibat aktif dalam diskusi tentang isu-isu pendidikan. Ini mencakup pembentukan jaringan, serta organisasi pendidikan yang awalnya didirikan negara untuk melayani masyarakat di satu sisi, maupun pemerintah di sisi lainnya (Astawa, 2017).

Peran serta pemerintah untuk memajukan pendidikan

Pelaksana negara dalam sektor pendidikan adalah pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan panduan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan. Di samping itu, tugas pemerintah juga mencakup pemberian pelayanan pendidikan yang bermutu serta fasilitas yang mencukupi kepada seluruh penduduk tanpa membedakan (Hapsara, 2019). Pemerintah dan pemerintah daerah juga harus menjamin ketersediaan dana untuk pendidikan bagi semua warga negara mulai yang berumur tujuh tahun hingga tujuh belas tahun. Peluang bagi orang dewasa dan usia lanjut dalam pendidikan juga harus diberikan secara luas.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagai sumber pengetahuan yang penting, baik itu melalui Lembaga pendidikan resmi maupun pendidikan di luar konteks sekolah. Pemerintah memberikan ketetapan tentang utamanya kesadaran dari masyarakat dalam mengakses pengetahuan melalui jalur pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan meningkatnya kapasitas kemampuan manusia Indonesia, pendidikan yang memadai, dan kecakapan yang meningkat, maka daya saing tenaga kerja Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri menjadi meningkat pula.

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat banyak, akan tetapi kapasitas kemampuan manusia Indonesia belum cukup memadai untuk dapat mengelolanya. Akibatnya, sumber daya alam yang melimpah tersebut dikelola oleh negara asing dan Indonesia hanya mendapatkan keuntungan yang jumlahnya terbatas. Tentu saja ini menimbulkan kekecawaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara menyeluruh.

Dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut, pemerintah harus berperan aktif, terutama dalam aspek pendidikan. Pendidikan yang baik dan layak akan mendukung peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai peran dalam pendidikan yang dimiliki oleh

pemerintah yaitu sebagai pelayan bagi masyarakat, penyedia fasilitas, pendamping, rekanan, sekaligus menjadi penanggung jawab pendanaan. Peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Peran menjadi pelayan masyarakat. Pihak pemerintah bertindak sebagai pelayan pendidikan bagi masyarakatnya dengan menyediakan kebutuhan segala hal yang berkenaan dengan edukasi masyarakat. Pemerintahlah yang harus memprioritaskan pelayanan kepada masyarakatnya agar pengembangan pendidikan menjadi baik. 2) Peran sebagai fasilitator: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan tempat atau fasilitas pendidikan. Pemerintah seharusnya mengadakan interaksi dengan masyarakatnya, menjadi pendengar bagi aspirasi berkenaan dengan fasilitas sekolah yang ada di daerah itu, dan memverifikasi keluhan masyarakat terkait kekurangan atau perlunya perbaikan fasilitas. 3) Peran “sebagai” pendamping. Selain sebagai “pelayan” masyarakat, pemerintah juga memiliki peran sebagai pendamping dalam pendidikan. Pemerintah dapat mendampingi masyarakat dan menerima keluhan mereka terkait pendidikan, sehingga masyarakat merasa didampingi oleh pemerintah dalam mencari jawaban atas keluhan mereka mengenai pendidikan di daerah masing-masing. 4) Peran sebagai mitra: Pemerintah berperan sebagai mitra antara sekolah dan masyarakat dengan bekerja sama dalam menentukan kebijakan pendidikan. Pemerintah harus memahami kondisi pendidikan di setiap daerah untuk menetapkan kebijakan tanpa adanya unsur pemaksaan. Keputusan tersebut harus dibahas dengan pihak sekolah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kebijakan baru. 5) Peran sebagai penyandang dana: Pemerintah sebagai penyandang dana memberikan bantuan keuangan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan dan memberikan bantuan dana kepada siswa yang memerlukannya.

Problematika Peran Masyarakat dan Pemerinah dalam Pendidikan

Dari pengalaman kejadian yang sudah lewat dapat diambil pelajaran bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peranserta masyarakat hanya dianggap sebagai kewajiban, masyarakat akan terabaikan dalam proses pendidikan. Dalam era globalisasi, penguatan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat seharusnya dianggap sebagai hak, bukan hanya sebagai kewajiban. Rakyat (anggota masyarakat) harus memiliki kontrol terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Hal ini merupakan hak masyarakat untuk ikut serta dalam mengendalikan agenda dan menentukan prioritas pembangunan yang sesuai untuk diri mereka atau kelompok mereka. Oleh karena itu, tidak dapat diterima jika satu golongan, baik itu dari internal seperti pejabat pemerintah atau usahawan, maupun eksternal seperti kekuatan besar seperti lembaga (keuangan) internasional, mengendalikan keinginan dan kepentingannya dalam pembuatan keputusan pendidikan (Karsidi, 2002).

Tanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan sebagai proses sosialisasi terletak pada orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap hal tersebut. Tanggung jawab ini tidak pernah hilang, namun dapat mengendur seiring dominasi paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik. Namun, karena paradigma ini telah bergeser menuju peningkatan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk memulihkan dan mengembalikan tanggung jawab masyarakat terhadap pengembangan pendidikan baik secara mikro maupun dalam skala yang lebih luas.

Bahkan ada anggapan bahwa peran keluarga bukanlah yang utama, melainkan hanya sebagai pelengkap. Hal ini karena pengetahuan formal telah diperoleh melalui pendidikan di sekolah. Logika ini tidak hanya keliru dari segi etika, tetapi juga mempertanyakan pandangan moral terhadap peran keluarga. Keluarga seharusnya merupakan institusi pendidikan pertama dan utama, yang kemudian dilengkapi dengan nilai-nilai pengetahuan yang diperoleh di sekolah.

Masalah pendidikan di Indonesia yang sering timbul dilihat dari dua perspektif, yaitu peran masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan adalah sebagai berikut : Peran Masyarakat: 1) Kesadaran akan pentingnya pendidikan: Masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang cukup di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Beberapa keluarga mungkin masih menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang kurang penting atau kurang prioritas, sehingga mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. 2) Keterbatasan aksesibilitas: Beberapa daerah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal aksesibilitas

pendidikan. Terutama daerah terpencil, terpencil, dan pulau-pulau kecil, yang seringkali sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan. Hal ini menyebabkan banyak anak tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik. 3) Keterbatasan ekonomi: Banyak keluarga di Indonesia menghadapi keterbatasan ekonomi yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan. Biaya pendidikan seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi bisa menjadi beban yang berat bagi keluarga dengan pendapatan rendah. 4) Kurangnya peran aktif orang tua: Banyak orang tua di Indonesia kurang terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Ini termasuk kurangnya dukungan dan perhatian dalam kegiatan belajar di rumah, kurangnya pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja anak di sekolah, serta kurangnya dorongan untuk mengikuti pendidikan setinggi mungkin.

Peran Pemerintah: 1) Anggaran pendidikan yang tidak memadai: Salah satu masalah utama dalam pendidikan di Indonesia adalah alokasi anggaran pendidikan yang masih rendah. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, memberikan pelatihan yang memadai bagi guru, serta menyediakan bantuan keuangan untuk memastikan aksesibilitas pendidikan bagi semua. 2) Kualitas guru dan kurikulum: Kualitas guru di beberapa daerah masih menjadi permasalahan. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru melalui pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan status sosial dan finansial mereka. Selain itu, kurikulum juga perlu diperbarui secara teratur untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan zaman dan perkembangan global. 3) Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai: Banyak sekolah di Indonesia masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai agar siswa dapat belajar dengan lingkungan yang kondusif. 4) Monitoring dan evaluasi yang lebih baik: Pemerintah perlu meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan di seluruh tingkatan. Hal ini penting untuk mengenali permasalahan yang ada, mengukur kemajuan, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan.

Penting untuk diingat bahwa solusi yang efektif untuk masalah pendidikan di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Dukungan dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak sangat penting untuk mencapai perubahan positif dalam sistem pendidikan.

Solusi mencegah dan mengatasi Problematika Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pendidikan

Lembaga pendidikan, atau biasa disebut sekolah, merupakan tempat di mana seseorang dapat memperoleh pendidikan. Pendirian sekolah di suatu daerah didasarkan pada keberadaan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa kontribusi dari masyarakat. Untuk menjaga keberlangsungan sekolah, peran masyarakat sangatlah penting. Peran ini dapat bersifat nyata maupun tidak terlihat oleh banyak orang.

Dalam kaitannya dengan pencegahan maupun penanggulangan problematika peran masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan, maka perlu adanya bentuk hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat.

Ada beberapa bentuk hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, antara lain: 1) Melibatkan warga sekolah dalam kegiatan sosial. Dalam hal ini, siswa dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan bersama masyarakat untuk memahami interaksi sosial di luar lingkungan sekolah (Hapsara, 2016). Hal ini bertujuan agar siswa tidak merasa canggung saat berinteraksi dengan masyarakat luas. 2) Menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat. Sekolah dapat memberikan bantuan fasilitas kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat tidak perlu repot mencari tempat karena sekolah di wilayah tersebut memberikan fasilitas tempat yang dapat digunakan. 3) Memanfaatkan tokoh-tokoh berpotensi dalam masyarakat untuk mendukung pendidikan. Misalnya, melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang penting bagi siswa dan guru yang merasa belum menguasai materi dengan baik. Dengan bantuan tokoh-tokoh tersebut, materi yang diperlukan dapat disampaikan kepada siswa. Libatkan juga sekolah dalam mendukung

pelaksanaan pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga warga sekolah aktif dalam bidang pendidikan. 4) Membangun hubungan dengan instansi lain. Lembaga pendidikan perlu menjalin hubungan dengan instansi lain untuk meningkatkan pengetahuan, informasi, atau aspek lain yang terkait dengan instansi tersebut. Instansi-instansi ini memiliki peran penting dalam lembaga pendidikan, terutama bagi warga sekolah. Dengan menjalin hubungan yang baik, instansi dapat menjadi mitra yang berharga dan kegiatan mereka dibutuhkan oleh sekolah.

4. Simpulan dan Saran

Pendidikan adalah tanggung jawab yang harus diemban secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Peran keduanya sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan memiliki peran dalam mendukung, mengawasi, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti mendirikan sekolah, menyumbangkan buku-buku, dan menyediakan akses internet bagi siswa yang membutuhkannya. Selain itu, masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan pengajaran di sekolah sebagai relawan atau mentor. Dengan berperan aktif, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak.

Peran pemerintah sangat signifikan dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang baik dan merata. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan, termasuk untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Di samping itu, tugas pemerintah juga meliputi pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan guna menjamin kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Peran serta masyarakat pada forum-forum diskusi dan pertemuan dengan pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang diambil. Dengan demikian, kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Pada akhirnya, peran masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan saling melengkapi. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi proses pendidikan, sementara pemerintah perlu menyediakan kebijakan dan anggaran yang memadai. Hanya dengan kerjasama yang baik antara keduanya, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, serta mendorong kemajuan pendidikan bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2007. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Amadi, T. S. (2012). Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat.
- Arif, Saiful. 2007. Pendidikan karakter. Yogyakarta : balai pustaka
- Astawa, I. N. T. (2017). Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. Jurnal penjaminan mutu, 3(2), 197-205.
- Chan, Sam M. dan Tuti. 2005. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dhomiri, A., Junedi, J., & Nursikin, M. (2023). Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(1), 118-128.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haderani, H. (2018). Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia. Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7(1).
- Hapsara, A. S. (2016). Pemanfaatan sampah plastik gelas air mineral sebagai alat peraga pembelajaran sosiologi. *Adi Karsa : Jurnal Teknologi Komunikasi Pendidikan*, 7(2), 58-68. <https://ejournal.btkp-diy.or.id/index.php/adikarsa/article/view/7>
- Hapsara, A. S. (2019). Membangun Karakter Mandiri pada Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Strategi Scrum di Negara Totochan. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 4(1), 12-21. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v4i1.78>

- Hasan, M., Yani M, Y. M., Supatminingsih, T., Inanna, I., & Dinar, M. (2021). Ekspektasi Orang Tua terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi Informal. *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 9(2), 183-199.
- Hermanto, S., Uda, T., & Alexandro, R. (2014). Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan:(Suatu Bahasan Kebijakan Pendidikan). *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(2), 122-129.
- Hidayatulloh, M. A., & Fauziyah, N. L. (2020). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Satuan PAUD Islam. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 5(4), 149-158.
- Kurniati, P., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Model proses inovasi kurikulum merdeka implikasinya bagi siswa dan guru abad 21. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 408-423.
- Noor, T. (2018). rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3(01).
- Saleh, S., Nasution, T., & Harahap, P. (2020). Pendidikan Luar Sekolah.
- Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2), 166-178.
- Sugiyono. 2007. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Rajawali Press
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29-39.
- Syarbaini. 2012. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi (Implementasi Nilai- Nilai Karakter Bangsa)*. Ghalia Indonesia
- Syarbini, A. (2014). Model pendidikan karakter dalam keluarga. *Elex Media Komputindo*.
<http://chaqoqo.staff.iainsalatiga.ac.id/2013/10/17/peran-pemerintah-dalam-pendidikan/>
<http://lailiakhiliyyah.blogspot.co.id/2011/11/peran-pemerintah-dalam-meningkatkan.html>